

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inflasi masih menjadi isu penting yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian setiap negara. Inflasi yang meningkat secara terus-menerus dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Fery dan Amelia, 2006:173). Baasir (2003:265), menyatakan terjadinya kegagalan pasar atau guncangan dalam negeri dapat menyebabkan fluktuasi tingkat harga pasar dan berpengaruh pada kondisi inflasi pada perekonomian. Menurut Mishkin (2004:632), inflasi merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan tingkat harga yang terus-menerus dan berkelanjutan serta diikuti dengan tingginya jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Mankiw (2006), menyatakan *"Economist use the term inflation to describe a situation in which the economy's overall price level is rising"*. Sehingga, terjadinya kenaikan harga-harga barang tidak selalu pada presentase yang sama, tetapi secara keseluruhan terjadi peningkatan pada level harga tertentu (Pohan, 2008).

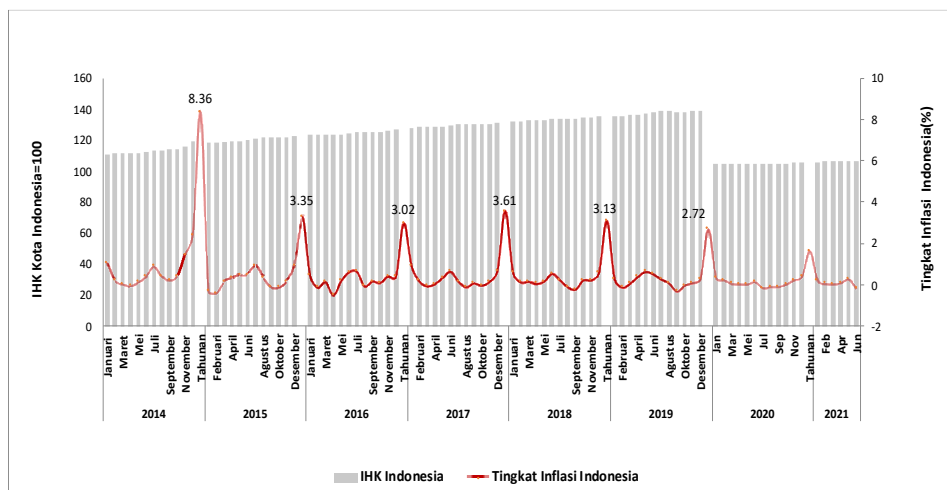
Inflasi menjadi permasalahan makro ekonomi yang dialami hampir semua negara di dunia. Awal mula penyebaran jumlah uang beredar yang cukup besar di masyarakat dengan jumlah barang yang dijual tetap maka akan membuat daya beli meningkat dalam waktu yang singkat, sehingga pasar tidak mampu memenuhi tingginya permintaan. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga secara agregat yang disebut dengan *Quantity Theory Inflation*. Kenaikan harga secara agregat akan menurunkan standar hidup, sebab ketika harga naik barang dan jasa hanya mampu diperoleh dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal ini karena, secara riil nilai mata uang lebih kecil daripada nominal mata uang.

Tingginya harga-harga di pasar juga berdampak pada produsen dengan semakin mahalnya harga bahan baku untuk memproduksi suatu barang sehingga akan menaikkan harga jual barang. Hal tersebut akan berpengaruh juga pada tingkat inflasi yang disebut dengan *Cost Push Inflation*. Serta, kenaikan dari sisi permintaan akan menyebabkan output meningkat dan merespon pada kenaikan harga. Hal ini disebut dengan *Demand Pull Inflation*. Ketidakstabilan nilai tukar

terhadap mata uang asing dapat memengaruhi arus modal atau investasi pada perdagangan internasional. Sehingga, hal ini akan menyebabkan kenaikan harga komoditi impor (*Imported Inflation*).

Menurut Bank Indonesia (2018), menyatakan bahwa inflasi dengan tingkat yang rendah (*low inflation*) merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil dan standar hidup masyarakat mengalami penurunan. Kondisi inflasi yang tidak stabil akan memberikan ketidakpastian pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Indeks yang digunakan dalam menghitung inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi IHK menggunakan pengukuran Sensus Ekonomi, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Sensus Penduduk, Sensus Biaya Hidup.

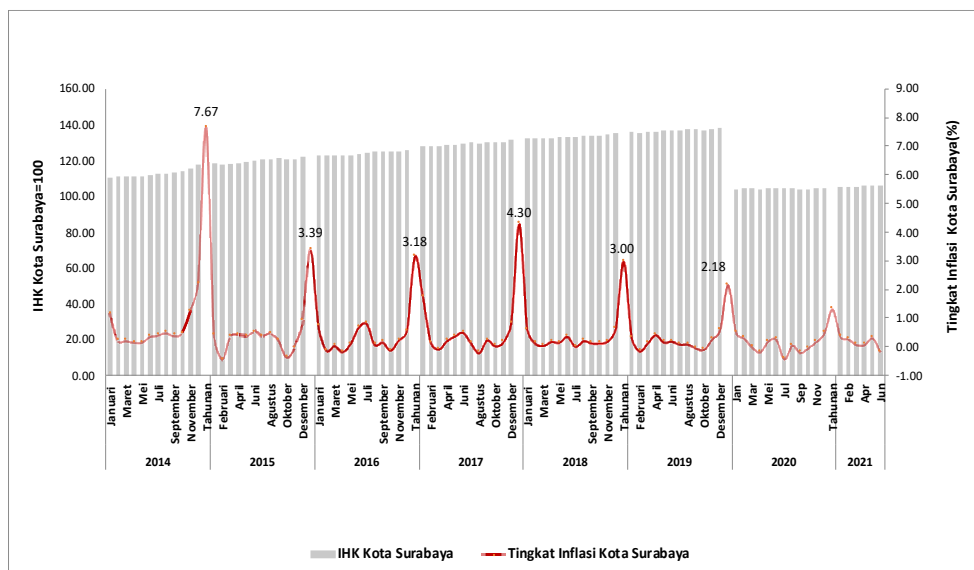
Terdapat beberapa indikator dalam perhitungan inflasi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Indeks Harga Implisit (Raharja dan Manurung, 2008). Namun menurut Bank Indonesia, indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di Indonesia adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Peramalan IHK menjadi penting sebagai deteksi dini dalam menghadapi lonjakan harga (Deltha, 2017). Indeks Harga konsumen (IHK) dapat diartikan, sebagai nilai indeks yang menggambarkan rata-rata perubahan harga dari suatu komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan inflasi maupun deflasi dari barang dan jasa secara umum.



Gambar 1. 1 Pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia dan Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2014m1-2021m6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Perkembangan laju inflasi dapat diketahui melalui gambar 1.1 yang menjelaskan pada tahun 2014, tingkat inflasi cenderung tinggi dikarenakan terjadi *shock* yang bersumber dari inflasi non inti *volatile food* dan *administered prices* sebesar 8.36 persen (yoy). Namun, pergerakan inflasi secara drastis mengalami penurunan cukup tajam dan dapat dikendalikan pada tahun 2015 sebesar 3.35 persen *year on year* (yoy) (BPS, 2022). Terkendalinya IHK dan inflasi dari inflasi bulanan (*month-to-month*) terjadi tahun 2015 triwulan I yang mengalami penurunan hingga triwulan III. Lanju inflasi yang terjadi pada tahun selanjutnya berada pada kondisi laju yang stabil, berkisar pada standar 3 persen, sehingga hal tersebut berdampak pada kondisi perekonomian yang lebih baik (Bank Indonesia, 2014).



Gambar 1. 2 Pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Surabaya dan Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2014m1-2021m6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Sedangkan, pada gambar 1.2 menjelaskan pergerakan IHK dan inflasi Kota Surabaya yang memiliki hubungan positif terhadap pergerakan IHK dan inflasi nasional. Pada Januari tahun 2014, Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 1,06 persen, Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara keseluruhan mengalami kenaikan IHK dan inflasi. Inflasi pada tahun 2014 cukup menarik terutama fenomena Kota Surabaya yang biasanya lebih rendah dari rata-rata inflasi Jawa Timur, justru menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,18 persen dibanding inflasi Jawa Timur dengan angka sebesar 1,06 persen (BPS, 2014). Pada November 2015 inflasi di Kota Surabaya meningkat sebesar 2.46 persen (mtm) dan Desember 2017 sebesar 4.37 persen (mtm). Sehingga, hal ini menjelaskan bahwa kondisi IHK dan tingkat inflasi di Kota Surabaya tercatat paling tinggi dari 8 kota di Jawa Timur.

Terciptanya kestabilan inflasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Perkembangan inflasi di Indonesia, merupakan agregat kumulatif dengan pembobotan tertentu dari inflasi daerah. Bobot perhitungan inflasi terbesar di Indonesia terletak di Pulau Jawa yang didominasi jumlah penduduk yang padat dan pembangunan infrastruktur yang cukup berkembang yakni sebesar 64,08%

(Bank Indonesia, 2015). Sehingga, perlu adanya upaya untuk mengendalikan laju inflasi. Pengendalian laju inflasi dilakukan oleh bank sentral selaku pemegang otoritas kebijakan, Bank Indonesia bertugas menjaga inflasi di Indonesia untuk tetap rendah dan stabil melalui kebijakan moneter (Remsperger dan Wingler, 2008). Kebijakan moneter yang digunakan yaitu *Inflation Targeting Framework* (ITF), dimana strategi kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengumumkan target inflasi yang hendak dicapai yang telah diterapkan sejak Juli 2005.

Tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang terkendali. Serta, pengendalian laju inflasi yang dapat dilakukan adalah dengan penetapan suku bunga. Bank sentral selaku otoritas moneter akan menaikkan suku bunga yang bertujuan untuk mempengaruhi suku bunga di perbankan (Theodores, *et al*, 2014). Penetapan suku bunga dalam upaya pengendalian inflasi tentu akan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Secara spesifik pada tahun 2008, dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas untuk membantu pencapaian tingkat inflasi di daerah. Inflasi nasional terbentuk dari inflasi daerah, sehingga penelitian tentang inflasi di tingkat regional seperti Regional Kota Surabaya sangat diperlukan. Inflasi nasional merupakan rata-rata tertimbang dari inflasi daerah di Indonesia, maka sangat penting untuk mempelajari perilaku inflasi di tingkat daerah, termasuk mengukur dan mencari penyebabnya, serta mengetahui implikasinya terhadap pengendalian inflasi daerah. Pemilihan salah satu kota di provinsi Jawa Timur, didasarkan pada Kota Surabaya mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2019 serta mengingat Kota Surabaya merupakan salah satu pusat bisnis, perdagangan, industri dan pendidikan di Jawa Timur dan bagian timur Indonesia. (BPS Jatim, 2020)

Sehingga, dalam memprediksi inflasi yang akan datang maka diperlukan peramalan. Menurut Heizer dan Render (2009:47), perkiraan atau *forecasting* bertujuan dalam mengkaji kebijakan yang berlaku serta pengaruh di masa datang. Berdasarkan fungsi dari forecasting, salah satunya dilakukan untuk perkiraan ekonomi (*economic forecast*). Hal ini dapat menjelaskan keterkaitan kondisi siklus bisnis dengan memprediksi kondisi inflasi dan indikator perencanaan lainnya (Heizer dan

Render, 2009:47). Bagi pemerintah, peramalan inflasi merupakan jembatan penghubung untuk mengetahui nilai inflasi yang akan datang (Lusia, 2014). Warsito (2020), menyatakan bahwa pemodelan dan peramalan inflasi diperlukan dalam estimasi pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Hal ini dilakukan, karena inflasi akan mengurangi nilai pendapatan masyarakat, serta menyebabkan distorsi harga relatif. Sehingga, menyebabkan kerugian efisiensi dan menurunkan basis produktif ekonomi.

Indeks Harga Konsumen dapat dijadikan sebagai ukuran inflasi, dimana didalamnya tercermin perkembangan berbagai harga barang dan jasa. IHK juga merupakan indikator stabilitas ekonomi dalam arti bahwa stabilnya perekonomian dapat dilihat dari laju inflasi, ketika inflasi tinggi stabilitas ekonomi akan terganggu karena masyarakat tidak mampu lagi membeli berbagai kebutuhan hidupnya. Kadiman (2005) menjelaskan “Pembangunan yang berkelanjutan selain ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga ditandai oleh terpeliharanya stabilitas ekonomi. Indikator pokok dari stabilitas ekonomi adalah laju inflasi yang diukur oleh perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)”.

Merujuk informasi di atas, oleh sebab itu pentingnya inflasi dalam menentukan pengambilan kebijakan ekonomi melalui kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga, memprediksi laju inflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen sebagai acuan dan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA).

Metode ARIMA merupakan salah satu metode dalam analisis *time series* yang umumnya disebut sebagai metode *time series Box-Jenkins*. Dalam metode ARIMA melibatkan model ARIMA (p,d,q) yaitu model yang menggunakan nilai saat ini dan masa lalu untuk mendapatkan hasil peramalan atau prediksi data dengan tepat dan akurat. Elvani dkk (2016) mengemukakan bahwa Metode Box-Jenkins merupakan suatu iteratif memilih model terbaik untuk series yang stasioner dari suatu kelompok model *time series* linier yang disebut model ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*). Metode ini mengasumsikan bahwa nilai series dihasilkan oleh proses stochastic (random) dengan bentuk yang dapat dijelaskan.

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka fokus penelitian

ini mengenai pola interaksi tingkat inflasi dalam menentukan pengambilan kebijakan ekonomi melalui kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk memprediksi laju inflasi khususnya di Kota Surabaya. Analisa ini menggunakan Indeks Harga Konsumen sebagai perhitungan inflasi dan menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Faiga Kharimah dkk, 2015) yang berjudul “*Time Series Modeling And Forecasting Of The Consumer Price Index Bandar Lampung*” dengan hasil menyatakan bahwa model ARIMA merupakan model terbaik dengan menunjukkan hasil peramalan mendekati data real didukung dengan pembuktian bahwa antara graph peramalan dan data real sangat berimpitan. Kemudian (Hartati, 2017) dalam penelitiannya mengenai peramalan laju inflasi menyatakan bahwa ARIMA adalah metode yang efektif dan akurat untuk melakukan peramalan data time series karena ARIMA merupakan suatu statistik yang cocok digunakan untuk meramal sejumlah variabel secara cepat, sederhana, murah, dan akurat karena hanya membutuhkan data variabel yang akan diramal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemodelan data IHK Kota Surabaya mulai tahun 2014 hingga 2021?
2. Bagaimana peramalan inflasi Kota Surabaya dalam pendekatan *time series* ARIMA (*Autoregressive integrated Moving Average*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Memodelkan data IHK Kota Surabaya dengan model ARIMA mulai tahun 2014-2021.
2. Meramalkan inflasi Kota Surabaya dalam pendekatan *time series* ARIMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk memantau perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Perubahan IHK menggambarkan kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga sehingga hasil akhirnya bahwa besarnya pengaruh IHK terhadap laju inflasi ekonomi dan ilmu pengetahuan. Mengenai prediksi inflasi nasional selama beberapa periode ke depan dengan menggunakan model terbaik yang telah diperoleh, yang nantinya akan berdampak besar terhadap maju tidaknya perekonomian di Kota Surabaya.

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau input dalam pengambilan kebijakan moneter khususnya bagi Bank Indonesia dan Pemerintah setempat Kota Surabaya. Serta, dapat digunakan dalam menentukan langkah antisipasi dalam membuat kebijakannya dan bagi masyarakat, sebagai informasi yang sangat penting untuk menentukan langkah atau acuan yang harus diambil dalam hubungannya dengan tabungan dan investasi bisnis.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, untuk memprediksi inflasi Kota Surabaya yang digunakan adalah data IHK mulai Januari 2014 hingga Juni 2021. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100) (BPS, 2022). Menurut Bank Indonesia tahun 2014, komoditas tersebut meliputi keseluruhan dalam Indeks inflasi nasional yang diukur dengan IHK di Indonesia dibedakan menjadi inflasi umum dan 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan COICOP), yaitu:

1. Kelompok bahan makanan
2. Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau
3. Kelompok perumahan
4. Kelompok sandang
5. Kelompok kesehatan
6. Kelompok pendidikan dan olah raga
7. Kelompok transportasi dan komunikasi.